



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

***PERUBAHAN***

***RENSTRA***

***TA. 2019-2023***

*“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”*



+62 541 652 5533



kesbangpol@kaltimprov.go.id



www.kesbangpol.kaltimprov.go.id



Jl. Jenderal Sudirman, No.1 Lt.2 Samarinda

## **KATA PENGANTAR**

---

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar OPD Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur menyusun Renstra Tahun 2019-2023, yang kemudian dilakukan Perubahan Renstra 2019-2023 yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD 2021-2023 Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka perlunya diadakan perubahan Renstra pada Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

**Drs.Sufian Agus, M.Si.**

NIP. 19660204 198803 1 016

## **DAFTAR ISI**

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>31</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>38</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>43</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b> .....	<b>71</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>75</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

---

## **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian Dinas/Badan Daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas/Badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana

Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pembangunannya berjalan efisien dan bersasaran.

Dengan adanya Perubahan Rancangan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (P-RPJMD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlunya diadakan perubahan Renstra pada Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 sebagai pedoman untuk Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021, Renja Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
48. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menjabarkan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas fungsi dan mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam konstitusi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Untuk memetakan permasalahan dan prioritas program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan serta sasaran jangka menengah yang bersifat strategis.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

**BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III           PERMASALAHAN            DAN            ISU            STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu- Isu Strategis.

**BAB IV            TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB V            STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya,

sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

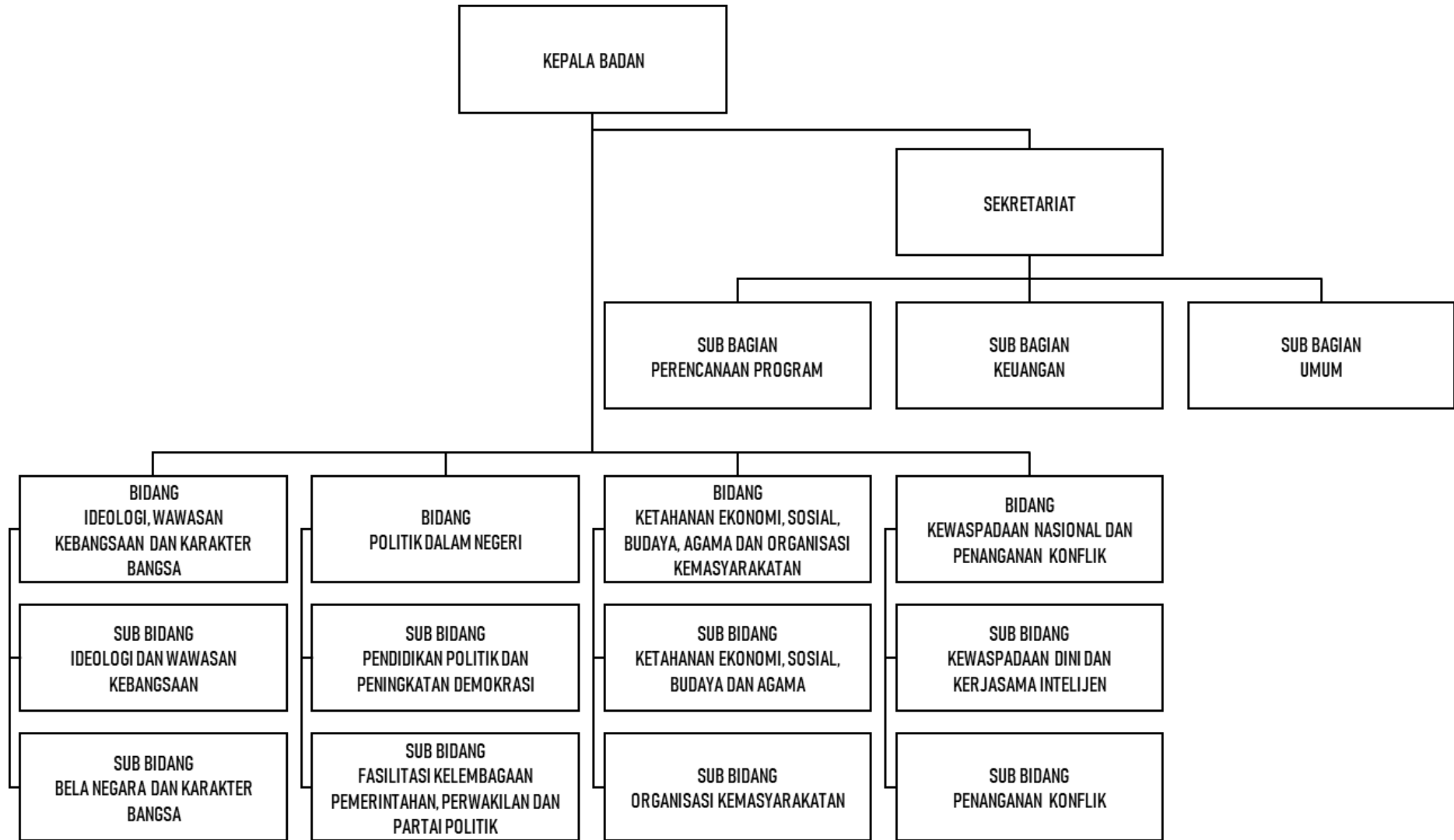
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2016 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub bagian Umum.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
  - 1. Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - 2. Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
  - 1. Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  - 2. Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
  - 1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - 2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
  - 1. Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI



Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**1. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.



## **2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

### **3. Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan

umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Politik Dalam Negeri membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:
- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
  - b. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

#### **4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dalam penghayat kepercayaan;
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

## **5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 50 orang, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
IV	7	3	10
III	15	10	25
II	13	2	15
I	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

Table 2.2.1 Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
I	0	0	0
II	1	0	1
III	3	2	5
IV	7	4	11
<b>Eselon</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>Non Eselon</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

Table 2.2.2 Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Adapun jumlah asset/modal dan unit usaha yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kendaraan Roda 4	18 unit	
2	Kendaraan Roda 2	12 unit	
3	AC Split	23 unit	
4	TV	11 unit	
5	Personal Komputer	unit	

Table 2.2.3 Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.1 dibawah ini:

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya Laporan TP3D				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah peserta Rakor Forkopimda/Rakor TP3D dalam rangka Sinergitas terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah				500 Orang	500 Orang	-	250 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	-	250 Orang	500 Orang	100%	100%	-	100%	100%
3	Tersedianya data Parpol Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/Desiminasi/Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	100%	100%	-	-	100%
5	Verifikasi Berkas Bantuan Parpol				10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Bantuan Parpol				100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	100%	-	-	100%	100%
7	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur		77.50%		73.50%	74.50%	75.50%	76.50%	77.50%	73.50%	74.50%	75.50%	76.50%	77.50%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/Workshop upaya Penguatan Sinergi Pemerintah Darah dan Instansi terkait dalam Peningkatan Capaian IDI Kaltim				100 Orang	100 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah peserta yang mengikuti Seminar/Lokarya/Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	400 Orang	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	400 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100%	100%	-	100%	100%
10	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di perbatasan				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah peserta yang mengikuti Apel Bendera (Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila)				800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan outbound PPWK				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah peserta yang mengikuti Apel Bendera di 10 SLTA				3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	3,000 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi FPK				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah peserta yang mengikuti Apel Bendera Bela Negara				400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti kegiatan Revolusi Mental				75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100%	100%	100%	100%



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi Pendidikan Karakter Bangsa				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penguatan Peran Ormas				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penguatan Peran Ormas				2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Ormas yang terverifikasi				30 Ormas	25	35	30	30	30	25	35	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah Ormas yang terpetakan				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
24	Dokumen Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah peserta sosialisasi Peredaran Uang Palsu				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah peserta FKUB				75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah peserta forum diskusi aktual agama dan kepercayaan				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
28	Peta Budaya				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
29	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
30	Terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat Kaltim				50 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	50 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
31	Tersedianya data/informasi deteksi dini dan cegah dini				2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
32	Meningkatnya pemahaman aparat/masyarakat tentang konflik dan kewaspadaan nasional				150 Orang	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	150 Orang	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
33	Meningkatnya pemahaman aparat/masyarakat tentang penanganan konflik sosial				150 Orang	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	150 Orang	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
34	Tersedianya laporan penanganan konflik sosial Kab/Kota se Kaltim				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
35	Termotivasinya Kab/Kota dalam menjaga kondusifitas daerahnya				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
36	Tersedianya wadah dialog bagi para pihak dalam penanganan konflik sosial (Forum, Instansi, Pemerinta, Swasta dan LSM)				3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
37	Tersedianya surat keterangan/rekomendasi penelitian				75 Rekom	85 Rekom	95 Rekom	95 Rekom	95 Rekom	75 Rekom	85 Rekom	95 Rekom	95 Rekom	95 Rekom	100%	100%	100%	100%	100%
38	Terlaksananya rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial				19 Ren. Aksi	22 Ren. Aksi	25 Ren. Aksi	30 Ren. Aksi	30 Ren. Aksi	19 Ren. Aksi	22 Ren. Aksi	25 Ren. Aksi	30 Ren. Aksi	30 Ren. Aksi	100%	100%	100%	100%	100%
39	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan intelijen bagi aparat				30 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	30 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
40	Terpantau/terdeteksi orang asing/tenaga kerja asing di Kaltim				1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	Tersedianya data orang asing/tenaga kerja asing di Kaltim				1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
42	Tersedianya data/peta potensi konflik Kab/Kota se Kaltim				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

**B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur**

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dianalisis pendanaan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam tabel 2.3.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
<b>Total Anggaran</b>	<b>28,549,787,209</b>	<b>18,363,148,999</b>	<b>14,172,143,355</b>	<b>10,973,662,000</b>	<b>12,345,212,000</b>	<b>22,616,094,386</b>	<b>17,185,760,530</b>	<b>13,078,488,077</b>	<b>9,838,219,524</b>	<b>11,899,844,603</b>	<b>79.22%</b>	<b>93.59%</b>	<b>92.28%</b>	<b>89.65%</b>	<b>96.39%</b>	<b>-57%</b>	<b>-47%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7,053,248,631</b>	<b>6,911,148,999</b>	<b>6,960,048,850</b>	<b>6,973,662,000</b>	<b>7,068,412,000</b>	<b>6,408,540,754</b>	<b>6,478,921,657</b>	<b>6,487,915,932</b>	<b>6,245,845,714</b>	<b>6,765,787,308</b>	<b>90.86%</b>	<b>93.75%</b>	<b>93.22%</b>	<b>89.56%</b>	<b>95.72%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>21,496,538,578</b>	<b>11,452,000,000</b>	<b>7,212,094,505</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>5,276,800,000</b>	<b>16,207,553,632</b>	<b>10,706,838,873</b>	<b>6,590,572,145</b>	<b>3,592,373,810</b>	<b>5,134,057,295</b>	<b>75.40%</b>	<b>93.49%</b>	<b>91.38%</b>	<b>89.81%</b>	<b>97.29%</b>	<b>-75%</b>	<b>-68%</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,545,736,640	1,191,913,700	934,083,975	679,680,000	469,911,000	1,261,513,038	1,074,206,746	790,480,155	527,787,568	466,888,566	81.61%	90.12%	84.63%	77.65%	99.36%	<b>-70%</b>	<b>-63%</b>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	702,100,000	159,360,000	80,500,000	36,931,000	64,214,000	591,249,165	149,240,003	79,461,137	20,173,092	60,336,854	84.21%	93.65%	98.71%	54.62%	93.96%	<b>-91%</b>	<b>-90%</b>
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39,600,000		30,600,000			36,900,000		30,600,000			93.18%		100.00%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	713,220,000	627,755,000	178,426,640			578,092,100	391,772,396	178,169,640			81.05%	62.41%	99.86%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,015,459,750	494,265,000	389,440,800			827,890,000	439,193,650	-			81.53%	88.86%	0.00%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,848,897,500	1,389,180,000	657,518,950	173,616,000	157,800,000	1,659,894,000	1,380,234,450	653,188,000	164,138,800	154,891,800	89.78%	99.36%	99.34%	94.54%	98.16%	<b>-91%</b>	<b>-91%</b>
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	738,000,000	620,800,000	660,960,000			574,800,000	592,200,000	639,810,000			77.89%	95.39%	96.80%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,463,631,250	324,430,000	397,817,100			1,272,157,200	313,122,800	386,932,600			86.92%	96.51%	97.26%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5,783,548,438	2,682,015,300	1,533,361,245	163,754,500		3,578,143,171	2,588,581,882	1,528,760,114	152,754,600		61.87%	96.52%	99.70%	93.28%		<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Pendidikan politik Masyarakat	5,115,000,000	2,399,501,000	1,414,797,550	1,700,110,500	3,735,875,000	3,730,077,758	2,279,360,196	1,372,568,299	1,524,119,970	3,614,446,908	72.92%	94.99%	97.02%	89.65%		<b>-27%</b>	<b>-3%</b>
Program Ketahanan Sosial Ekonomi	2,531,345,000	1,562,780,000	934,588,245			2,096,837,200	1,498,926,750	930,602,200			82.83%	95.91%	99.57%			<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				842,610,000	447,000,000				822,019,880	443,342,367				97.56%	99.18%	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				25,389,000	21,800,000				20,778,500	21,791,500				81.84%	99.96%	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				377,909,000	225,700,000				360,601,400	219,995,300				95.42%	97.47%	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas					154,500,000					152,364,000					98.62%	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **A. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### **1. Kondisi Internal**

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- d. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

#### **2. Kondisi Eksternal**

Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum serta Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

- a. Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Karakteristik Kalimantan Timur yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan

lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial / massa yang mengarah pada anarkhisme. Di samping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

- b. Politisasi Nilai-Nilai Agama. Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara - cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.
- c. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian sebagai tri tunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (civil society) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai “penengah” yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

- d. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.
- e. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik. Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dengan adanya perubahan perundang undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang

- berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).
- f. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat belum maksimal pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah pusat tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).
  - g. Program Pro-Masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
  - h. Adanya perkembangan digitalisasi yang semakin maju sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat kita yang mengakibatkan pemahaman dan penghayatan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurun.

## **B. Peluang**

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:

1. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan, peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan



kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau early warning system untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

2. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik, upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga - lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.
3. Pemulihan Wilayah Pasca Konflik stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan excess dan dispute yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta

peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stakeholder (Partai Politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik yang melibatkan Partai Politi, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat.
5. Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi Masyarakat Kalimantan Timur sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.
7. Peningkatan Anggaran dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.
8. Sarana dan Prasarana dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Pembinaan terhadap masyarakat dengan kegiatan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara diskusi, dialog, interaktif, seminar, perlombaan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana peningkatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masyarakat Kalimantan Timur.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.1.

<b>No</b>	<b>Permasalahan Berdasarkan Pelayanan</b>	<b>Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	Bidang Politik Dalam Negeri
2.	Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan pengamalan nilai Pancasila	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
3.	Masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan ormas	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Masih belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban dan kewaspadaan masyarakat	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
5.	Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat	Sekretariat

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Analisa Kondisi Internal maupun External

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visinya adalah:

#### ***“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”***

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 dan 5 yaitu **“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas”** dan **“Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik”**, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.2.1.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Belum maksimalnya kondusifitas Daerah	Kesadaran politik masyarakat masih rendah	Adanya peraturan yang dipedomani
Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Belum maksimalnya sistem informasi pelayanan yang mudah diakses melalui internet	Pengumpulan data dan analisis data terkait kebutuhan pembangunan sistem informasi	Tersedianya SDM yang mampu menangani pelayanan

Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pengdorong

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020 - 2024 adalah: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 tersebut adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan admin istrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat agro industri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Terwujudnya penataan ruang yang mendukung provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agro industri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Yang didukung dengan 4 (empat) kebijakan dengan 16 (enam belas) strategi. 4 (empat) kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan.

Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendukung tujuan pembangunan nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penataan ruang.

Dengan strategi:

- 1) Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk kepentingan ekonomi dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Mengembangkan kawasan industry dengan basis sektor produktif unggulan migas dan pertambangan dengan pengembangan manfaat dalam skala nasional dan regional

- provinsi dengan mengembangkan keterkaitan antara kawasan dan cluster industry.
- 3) Mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan eksplorasi, kawasan industry sektor migas dan pertambangan baik pada infrastruktur transportasi, energy dan kelistrikan.
  - 4) Meningkatkan pelayanan perkotaan, pemukiman, sektor migas dan pertambangan dan secara timbal balik menjadi pendorong pengembangan pertumbuhan kota sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.
2. Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang bersifat renewable. Sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah serta untuk tujuan mengembangkan provinsi Kalimantan Timur.
- Dengan strategi:
- 1) Mengembangkan potensi pada setiap wilayah untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan sector dan komoditas unggulan kegiatan sector pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah.
  - 2) Menjadikan bagian dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dengan mengembangkan wilayah berpotensi agraris pertanian, perkebunan dan perikanan yang pada umumnya adalah wilayah pedalaman, wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal.
  - 3) Mengembangkan wilayah tertinggal dan/atau pedalaman dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah timur – barat dengan mendorong pusat pertumbuhan baru dengan dukungan basis sektor pertanian.
  - 4) Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industry pendukungnya dengan membangun kawasan industry dan infrastruktur terkait.
3. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat.
- Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya dengan tidak hanya mengembangkan wilayah yang telah maju dan berkembang namun juga mengembangkan

wilayah yang belum maju, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan Negara.

Dengan strategi:

- 1) Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang.
  - 2) Meningkatkan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan pedesaan untuk kepentingan pelayanan social masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.
  - 3) Mendorong sector ekonomi produktif dan menata pusat pemukiman di kawasan perbatasan untuk memperkuat keterkaitan sosial ekonomi pada pusat kegiatan yang ada di Indonesia agar mencegah kebocoran ekonomi kepada wilayah Negara lain dan menjadi bagian tujuan menjaga kedaulatan NKRI.
  - 4) Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, energy, listrik dan komunikasi agar terjadi hubungan saling sinergi dan saling mendukung antar wilayah.
4. Perwujudan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan batasan dan daya dukung lingkungan  
Agar tingkat produktivitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan.
- Dengan strategi:
- 1) Mengupayakan tindakan aspiratif dan kuratif mengelola kegiatan budidaya yang berpotensi dan telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan secara konsisten untuk kepentingan keberlanjutan produktivitas kegiatan budidaya itu sendiri.
  - 2) Mengupayakan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang karakteristik fisik telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana.
  - 3) Mengupayakan penetapan pola ruang untuk deliniasi kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik kesesuaian dan daya dukung kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan kelestarian lingkungan,



produktivitas ekonomi, dan kepentingan social budaya masa depan.

- 4) Mengupayakan ketahanan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur dan kekayaan tradisi budaya dengan melakukan upaya pelestarian dan konservasi pada kawasan yang memilikinya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- A. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
- B. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
- C. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
- D. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

---

Tujuan dan sasaran merupakan kristalisasi dari Renstra Perangkat Daerah agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama 5 tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

### **A. TUJUAN**

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. ***Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis***, dengan tujuan:
  - Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis
2. ***Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan***, dengan tujuan:
  - Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan
3. ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama***, dengan tujuan:
  - Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama di Kalimantan Timur
4. ***Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur***, dengan tujuan:
  - Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur
5. ***Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur***, dengan tujuan:
  - Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur

Misi	Tujuan	
	Uraian	Indikator
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis	Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan	Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang berideologi Pancasila dan berkarakter bangsa	Indeks Ketahanan Nasional
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Timur	Indeks Ketahanan Ekososbud dan Agama
Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Indeks Kinerja Ormas
Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Indeks Kewaspadaan Daerah

Tabel 4.1.a Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

## B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan misi beserta penjelasannya, diatas maka sasaran pembangunan Badan Kesbangpol selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai Misi: ***Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis***, dengan sasaran:
  - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Sasaran yang hendak dicapai Misi: ***Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan***, dengan sasaran:
  - Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Khususnya Pelajar SLTA di Kalimantan Timur
3. Sasaran yang hendak dicapai Misi: ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama***, dengan sasaran:
  - Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Sasaran yang hendak dicapai Misi: ***Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur***, dengan sasaran:
  - Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Sasaran yang hendak dicapai Misi: ***Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur***, dengan sasaran:
  - Meningkatkan Kewaspadaan Dalam Menjaga Kondusifitas yang Tertib, Aman dan Nyaman di Kalimantan Timur

Misi	Sasaran	
	Uraian	Indikator
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi	Persentase Penggunaan Hak Politik Masyarakat
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, wasbang dan karakter bangsa	Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Persentase peningkatan ketahanan ekosobud dan agama

<b>Misi</b>	<b>Sasaran</b>	
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>
Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase jumlah terbinanya ormas
Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Persentase Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur

Tabel 4.1.b Matrik Hubungan antara Misi dan Sasaran

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	73,50%	74,50%	75,50%	76,50%	77,50%

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **A. STRATEGI**

Untuk mencapai ujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2019-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan strategi:

1. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat
2. Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi untuk menjaga keutuhan NKRI
3. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan penguatan ekonomi, sosial, budaya dan agama
4. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur
5. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan instansi dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan IDI	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat
Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, wasbang dan karakter bangsa	Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila	Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi untuk menjaga keutuhan NKRI
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Persentase peningkatan ketahanan ekosobud dan agama	Peningkatan pembinaan, pengembangan dan penguatan ekonomi, sosial, budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase jumlah terbinanya ormas	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur
Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan	Persentase Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan instansi dalam penanganan konflik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
nyaman di Kalimantan Timur		sosial di Kalimantan Timur

Tabel 5.A Penentuan Strategi

## B. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2019-2023 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut:

1. Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat
2. Membina dan membangun karakter bangsa secara berkesinambungan
3. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
4. Membina dan memberdayakan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur
5. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini daerah dan forum-forum

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat
Teewujudnya Masyarakat Kaltim yang berideologi Pancasila dan berkarakter bangsa	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, wasbang dan karakter bangsa	Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi untuk menjaga keutuhan NKRI	Membina dan membangun karakter bangsa secara berkesinambungan
Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Peningkatan pembinaan, pengembangan dan penguatan ekonomi, sosial, budaya dan	Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Kemasyarakatan di Kalimantan Timur		pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	organisasi kemasyarakatan
Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur	Membina dan memberdayakan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur
Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan instansi dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini daerah dan forum-forum

Tabel 5.B Penentuan Arah Kebijakan

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG DEMOKRATIS</b>					
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi	Persentase Penggunaan Hak Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat
<b>Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan</b>					
Teewujudnya Masyarakat Kaltim yang berideologi Pancasila dan berkarakter bangsa	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, wasbang dan karakter bangsa	Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan	Membina dan membangun karakter bangsa secara berkesinambungan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM</b>
				ekonomi untuk menjaga keutuhan NKRI	
<b>Misi 3: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama</b>					
Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Timur	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Persentase peningkatan ketahanan ekosobud dan agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Peningkatan pembinaan, pengembangan dan penguatan ekonomi, sosial, budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi kemasyarakatan
<b>Misi 4: Mewujudkan Pembinaan Dan Pemberdayaan Ormas Se Kalimantan Timur</b>					
Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase jumlah terbinanya ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur	Membina dan memberdayakan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur
<b>Misi 5: Mewujudkan Kewaspadaan Dan Kondusifitas Di Kalimantan Timur</b>					

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM</b>
Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Persentase Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan instansi dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini daerah dan forum-forum

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

- 1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**
  - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
  - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**
  - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
  - Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat**
  - Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
  - Penyusunan Data Base Partai Politik
  - Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik
  - Penyusunan IDI
  - Pendidikan Politik Masyarakat
- 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
  - Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
  - Peningkatan Kesadaran Bela Negara
- 7. Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas**
  - Peningkatan Kapasitas Ormas
  - Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
  - Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan
- 8. Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan**
  - Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya
  - Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan
  - Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
  - Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen
  - Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN TAHUN 2019-2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp (Juta)	
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG DAMAI, TENTRAM DAN DEMOKRATIS, SERTA BERWAWASAN KEBANGSAAN DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR</b>																			
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian : Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59%	865.806	60%	900.000	61%	905.000	62%	910.000	63%	915.000	63%	4.495.806	Sekretariat
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Masukan : Jumlah Dana Tersedianya Keluaran : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran Hasil : Administrasi Perkantoran		12 Bulan	865.806	12 Bulan	900.000	12 Bulan	905.000	12 Bulan	910.000	12 Bulan	915.000	12 Bulan	4.495.806	Sekretariat
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian : Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	194.500	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	1.194.500	Sekretariat
				Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Hasil : Kendaraan dan Peralatan Kantor		12 Bulan	63.900	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	663.900	Sekretariat
				Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Masukan : Jumlah Dana Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Keluaran : Kesbangpol Prov. Kalimantan Terwujudnya Peralatan dan Kelengkapan ASN Hasil : Kesbangpol Prov. Kalimantan		100%	130.600	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	530.600	Sekretariat
		Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemertintah Daerah	Capaian : Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	60%	985.458	60%	935.000	60%	1.060.300	60%	1.057.600	60%	1.089.800	60%	5.128.158	Sekretariat
				Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	710.000	12 Bulan	875.000	12 Bulan	885.000	12 Bulan	895.000	12 Bulan	905.000	12 Bulan	4.270.000	Sekretariat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp (Juta)	
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Hasil : Tersedianya Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan SDM Aparatur Kesbangpol Keluaran : Aparatur Kesbangpol yang profesional Hasil : 50 Org		50 Org	275.458	50 Org	60.000	50 Org	175.300	50 Org	162.600	50 Org	184.800	50 Org	858.158	Sekretariat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian : Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54.03%	56%	243.836	58%	815.000	60%	880.000	62%	895.000	64%	940.000	64%	3.773.836	Sekretariat
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Dokumen Perencanaan Anggaran Hasil : 12 Bulan		10 Dokumen	67.556	10 Dokumen	620.000	10 Dokumen	630.000	10 Dokumen	640.000	10 Dokumen	680.000	10 Dokumen	2.637.556	Sekretariat
				Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Dokumen Laporan Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan		6 Dokumen	176.280	6 Dokumen	195.000	6 Dokumen	250.000	6 Dokumen	255.000	6 Dokumen	260.000	6 Dokumen	1.136.280	Sekretariat
<b>MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG DEMOKRATIS</b>																			
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatnya kualitas demokrasi	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Capaian : Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72.86%	73.50%	2.492.300	74.50%	2.000.000	75.50%	1.484.600	76.50%	1.496.200	77.50%	2.151.500	77.50%	9.624.600	Bidang Politik Dalam Negeri
				Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Kegiatan Pemantauan dalam menjaga kondusifitas di Daerah. Laporan Kegiatan dan Laporan TP3D. Hasil : 4 Dokumen / 500 org		4 Dokumen / 500 org	1.393.200	4 Dokumen / 500 org	597.000	4 Dokumen	412.400	4 Dokumen / 250 org	582.755	4 Dokumen / 500 org	1.060.000	20 Dokumen / 1750 org	4.045.355	Bidang Politik Dalam Negeri
				Penyusunan Data Base Partai Politik	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan dan tersusunnya Dokumen Parpol Laporan Kegiatan dan Dokumen Parpol Hasil : 100 Org / 1 Dokumen		100 Org / 1 Dokumen	392.775	100 Org / 1 Dokumen	238.800	100 Org / 1 Dokumen	247.400	100 Org / 1 Dokumen	116.610	100 Org / 1 Dokumen	138.250	500 Org / 5 Dokumen	1.133.835	Bidang Politik Dalam Negeri
				Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelaksanaan kegiatan dan verifikasi berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil : 100 Org / 10 Parpol		100 Org / 10 Parpol	149.250	100 Org / 10 Parpol	206.200	100 Org / 10 Parpol	206.200	100 Org / 10 Parpol	97.175	100 Org / 10 Parpol	118.500	500 Org / 10 Parpol	571.125	Bidang Politik Dalam Negeri

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp (Juta)	
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Hasil : Dokumen Administrasi dan Bantuan Keuangan Parpol dan laporan kegiatan		-		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		55 Dokumen		
				Penyusunan IDI	Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan pemahaman Aparatur dan Tim Pokja IDI		100 Org	706.325	100 Org	417.950	100 Org	618.600	200 Org	310.960	200 Org	316.000	700 Org	2,369.835	Bidang Politik Dalam Negeri
					Hasil : Indeks Demokrasi Indonesia		73,50% / 100 org		74,50%		75,50%		76,50%		77,50%		77,50%		
				Pendidikan Politik Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara		-		400 Org	597.000	-		400 Org	388.700	400 Org	518.750	1,500 Org	1,504.450	Bidang Politik Dalam Negeri
					Hasil : Masyarakat Yang Paham Tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Sebagai Warga Negara		-		400 Org		-		400 Org		400 Org		1,500 Org		
<b>MISI 2: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN</b>																			
Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Capaian : Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa	125,341 Pelajar SLTA	5%	535.800	5%	1,234.400	5%	1,413.700	5%	1,420.400	5%	1,252.600	25%	5,856.900	Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan pemahaman Wawasan kebangsaan Pelajar yang memahami Wawasan Kebangsaan		3,200 Org (Pelajar)	267.900	3,200 Org (Pelajar)	617.200	3,200 Org (Pelajar)	706.850	3,200 Org (Pelajar)	710.200	3,200 Org (Pelajar)	626.300	16,000 Org (Pelajar)	2,928.450	Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
					Hasil : Jumlah peserta yang memahami Wawasan Kebangsaan		3,200 Org		3,200 Org		3,200 Org		3,200 Org		3,200 Org		16,000 Org		
				Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan Kesadaran Bela Negara		600 Org	267.900	600 Org	617.200	600 Org	706.850	600 Org	710.200	600 Org	626.300	3,000 Org	2,928.450	Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
					Hasil : Jumlah peserta yang memahami Bela Negara		600 Org		600 Org		600 Org		600 Org		600 Org		3,000 Org		
<b>MISI 3: MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>																			
Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Capaian : Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	100 Ormas	596.800	120 Ormas	1,231.500	120 Ormas	1,483.600	120 Ormas	1,490.700	127 Ormas	1,324.800	587 Ormas	6,127.400	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp (Juta)	
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tan di Kalimantan Timur		sosial dan budaya																	
				Peningkatan Kapasitas Ormas	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terewujudnya SKT / SKM maupun rekomendasi hibah dan bansos Hasil : Jumlah SKT/SKM diterbitkan Hasil : Jumlah Rekomendasi Hibah/Bansos		50 SKT/SKM, 20 Rekom	150.850	30 SKT/SKM, 20 Rekom	481.500	30 SKT/SKM, 20 Rekom	550.000	30 SKT/SKM, 20 Rekom	550.000	30 SKT/SKM, 20 Rekom	550.000	170 SKT/SKM, 100 Rekom	2.282.350	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat
				Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Peserta Tes Urine Data Ekonomi, dan Sosbud di 10 Kab/Kota Hasil : Laporan Hasil Kegiatan		52 Org 4 Dokumen 1 Dokumen	290.800	52 Org 4 Dokumen 1 Dokumen	300.000	52 Org 4 Dokumen 1 Dokumen	433.600	52 Org 4 Dokumen 1 Dokumen	440.700	52 Org 4 Dokumen 1 Dokumen	300.000	260 Org 20 Dokumen 5 Dokumen	1.765.100	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat
				Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah pembinaan terhadap ormas Hasil : Terlaksananya kegiatan sosialisasi Laporan Hasil Kegiatan		30 Ormas 100 Org 1 Dokumen	155.150	30 Ormas 100 Org 1 Dokumen	300.000	30 Ormas 100 Org 1 Dokumen	300.000	30 Ormas 100 Org 1 Dokumen	300.000	30 Ormas 100 Org 1 Dokumen	324.800	150 Ormas 500 Org 5 Dokumen	1.379.950	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat
				Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan Hasil : Laporan Hasil Kegiatan		- - -	-	100 Org 1 Dokumen	150.000	100 Org 1 Dokumen	200.000	100 Org 1 Dokumen	200.000	100 Org 1 Dokumen	150.000	500 Org 5 Dokumen	700.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN KEWASPADAAN DAN KONDUSIFITAS DI KALIMANTAN TIMUR</b>																			
Terewujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur		Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Capaian : Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	507 Konflik	102 Konflik	721.900	102 Konflik	1.269.100	102 Konflik	1.522.800	100 Konflik	1.530.100	101 Konflik	1.365.300	507 Konflik	#REF!	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
				Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Meningkatkan SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban		-	150 Org	190.000	210 Org	230.000	210 Org	230.000	210 Org	190.000	930 Org	840.000		Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp (Juta)	
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					dan ketentruman														
					Hasil : Laporan Hasil Kegiatan		-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
				Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan	Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentruman		150 Org	188.160	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Org	188.160	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
					Keluaran : keamanannya, ketertiban dan ketentruman		1 Dokumen										1 Dokumen		
				Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Masukan : Jumlah Dana Sinergitas dan kebersamaan yang harmonis antara aparat keamanan dan pemerintah serta masyarakat		19 Rencana Aksi	225.400	22 Rencana Aksi	370.000	25 Rencana Aksi	450.000	30 Rencana Aksi	450.000	30 Rencana Aksi	416.200	126 Rencana Aksi	1.911.600	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
					Keluaran : Laporan Rencana Aksi dan Penanganan serta penyelesaian konflik sosial secara terpadu		19 Rencana Aksi		22 Rencana Aksi		25 Rencana Aksi		30 Rencana Aksi		30 Rencana Aksi		126 Rencana Aksi		
				Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	Masukan : Jumlah Dana Tenaga terlatih dan Profesionalitas tenaga keamanan meningkat		-	-	30 Org	230.000	60 Org	270.000	60 Org	270.000	60 Org	230.000	240 Org	#REF!	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
				Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Hasil : penyelesaian konflik sosial secara terpadu		-		30 Org		60 Org		60 Org		60 Org		240 Org		
					Masukan : Jumlah Dana		308.340			479.100		572.800		580.100		529.100		2.469.440	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Dengan adanya Perubahan Rancangan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (P-RPJMD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlunya diadakan perubahan Renstra pada Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan, indikator serta rincian pendanaan menjadi:

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
- d. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- e. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- f. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - c. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - e. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

## **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

### **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

## **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

### **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

PRB

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>11.078.753.960,00</b>	<b>14.401.229.052,00</b>	<b>14.356.500.000,00</b>
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>						<b>11.078.753.960,00</b>	<b>14.401.229.052,00</b>	<b>14.356.500.000,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Capaian:</b>					<b>11.078.753.960,00</b>	<b>14.401.229.052,00</b>	<b>14.356.500.000,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran:</b> Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>	<b>415.231.800,00</b>	<b>455.223.500,00</b>	<b>591.500.000,00</b>
	<b>Hasil:</b> Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	6,00	6,00	Dokumen	174.722.600,00	6.499.500,00	7.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen RKA SKPD	1,00	1,00	1,00	Dokumen	2.692.000,00	1.902.500,00	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,00	1,00	1,00	Dokumen	2.692.000,00	1.902.500,00	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen DPA SKPD	1,00	1,00	1,00	Dokumen	2.092.000,00	1.302.500,00	1.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indikator: Jumlah DPPA SKPD	1,00	1,00	1,00	Dokumen	2.092.000,00	1.302.500,00	1.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	1,00	1,00	1,00	Dokumen	2.333.200,00	1.806.500,00	2.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	5,00	5,00	Dokumen	228.608.000,00	440.507.500,00	575.000.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran:</b> Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>	<b>9.435.799.112,00</b>	<b>9.885.540.226,00</b>	<b>9.920.393.226,00</b>
	<b>Hasil:</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator: Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	14,00	14,00	Laporan	8.818.071.000,00	9.471.040.226,00	9.471.040.226,00



URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator: Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24,00	12,00	12,00	Laporan	567.392.112,00	355.200.000,00	376.800.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	12,00	Laporan	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00	12,00	Laporan	0,00	1.754.500,00	1.754.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen Keuangan	1,00	1,00	1,00	Dokumen	1.000.000,00	1.066.500,00	1.066.500,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan (TLHP)		1,00	1,00	Dokumen	0,00	740.000,00	1.066.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator: Jumlah Laporan Keuangan	18,00	18,00	18,00	Laporan	49.336.000,00	51.814.500,00	64.414.500,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indikator: Jumlah Dokumen Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran		1,00	1,00	Dokumen	0,00	740.000,00	1.066.500,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>39.671.500,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Hasil: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah		1,00	1,00	Dokumen	0,00	1.002.500,00	931.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah		1,00	1,00	Laporan	0,00	500.000,00	600.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Rekapitulasi Nilai Aset		1,00	1,00	Laporan	0,00	500.000,00	600.000,00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Inventarisasi Kendali Barang Milik Daerah		1,00	1,00	Laporan	0,00	500.000,00	600.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah		1,00	1,00	Dokumen	0,00	35.300.000,00	35.300.000,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator: Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1,00	1,00	1,00	Laporan	57.600.000,00	1.369.000,00	1.369.000,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1,00	1,00	Laporan	0,00	500.000,00	600.000,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran: Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>0,00</b>	<b>97.206.500,00</b>	<b>100.100.000,00</b>
	<b>Hasil: Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab</b>		<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	Orang			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		67,00	67,00	Orang	0,00	8.040.000,00	10.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator: Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN		67,00	67,00	Orang	0,00	87.100.000,00	87.100.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator: Jumlah Dokumen Kepegawaian		55,00	55,00	Dokumen	0,00	1.066.500,00	1.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indikator: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1,00	1,00	Dokumen	0,00	500.000,00	1.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		55,00	55,00	Laporan	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran: Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>	<b>1.002.844.910,00</b>	<b>1.514.548.035,00</b>	<b>2.233.287.483,00</b>
	<b>Hasil: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan	10,00	10,00	10,00	Laporan	343.674.410,00	355.614.256,00	604.908.704,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Rumah Tangga	13,00	2,00	2,00	Unit	150.880.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2,00	2,00	Laporan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,00	13,00	13,00	Laporan	11.546.500,00	67.158.779,00	80.158.779,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator: Jumlah Surat Kabar	12,00	4.380,00	4.380,00	Surat Kabar	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,00	3,00	3,00	Dokumen	485.224.000,00	1.038.555.000,00	1.370.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator: Jumlah Dokumen Arsip Dinamis		1,00	1,00	Dokumen	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator: Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			5,00	Sistem	0,00	0,00	125.000.000,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Keluaran: Tersedianya Kendaraan Dinas</b>		<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>Unit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.680.000,00</b>	<b>404.050.000,00</b>
	<b>Hasil: Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas</b>		<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>Unit</b>			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas		5,00	11,00	Unit	0,00	1.325.680.000,00	404.050.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Keluaran: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>	<b>73.222.838,00</b>	<b>760.716.591,00</b>	<b>760.716.591,00</b>
	<b>Hasil: Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator: Jumlah Materai	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Lembar	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	12,00	12,00	Laporan	61.222.838,00	121.111.671,00	121.111.671,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator: Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN		13,00	13,00	Laporan	0,00	624.604.920,00	624.604.920,00
	<b>Keluaran: Tersedianya Pemeliharaan</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>	<b>94.055.300,00</b>	<b>322.642.700,00</b>	<b>306.452.700,00</b>

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
	<b>Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Bulan</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator: Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21,00	21,00	21,00	Unit	67.055.300,00	206.452.700,00	206.452.700,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator: Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	40,00	50,00	50,00	Unit	27.000.000,00	116.190.000,00	100.000.000,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		-	-	-		<b>8.616.432.978,00</b>	<b>10.433.744.548,00</b>	<b>12.978.473.600,00</b>
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		-	-	-		<b>8.616.432.978,00</b>	<b>10.433.744.548,00</b>	<b>12.978.473.600,00</b>
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Capaian: Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>%</b>	<b>1.098.351.368,00</b>	<b>1.572.669.296,00</b>	<b>2.956.500.000,00</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Keluaran: Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>1.098.351.368,00</b>	<b>1.572.669.296,00</b>	<b>2.956.500.000,00</b>
	<b>Hasil: Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>9.140,00</b>	<b>10.664,00</b>	<b>12.187,00</b>	<b>Orang</b>			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2,00	2,00	2,00	Laporan	1.370.000,00	1.370.000,00	1.500.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	7,00	8,00	9,00	Laporan	3.360.000,00	6.600.000,00	6.000.000,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	9,00	11,00	12,00	Laporan	534.999.368,00	965.063.296,00	2.250.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	35,00	35,00	31,00	O/T	203.806.000,00	229.268.000,00	279.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	75,00	90,00	100,00	O/T	354.816.000,00	370.368.000,00	420.000.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Capaian: Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat</b>	<b>67,50</b>	<b>68,00</b>	<b>68,50</b>	<b>%</b>	<b>4.821.773.138,00</b>	<b>3.293.146.568,00</b>	<b>3.646.186.800,00</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Keluaran: Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>4.821.773.138,00</b>	<b>3.293.146.568,00</b>	<b>3.646.186.800,00</b>
	<b>Hasil: Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan</b>	<b>56,65</b>	<b>56,75</b>	<b>56,85</b>	<b>%</b>			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2,00	2,00	2,00	Laporan	2.133.125.838,00	1.412.200,00	1.500.000,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	2,00	2,00	2,00	Laporan	1.720.100,00	2.160.000,00	6.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	21,00	21,00	21,00	Laporan	2.031.647.200,00	2.648.503.368,00	2.984.686.800,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	33,00	25,00	26,00	O/T	297.000.000,00	225.000.000,00	234.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	90,00	117,00	100,00	O/T	358.280.000,00	416.071.000,00	420.000.000,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Capaian: Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim</b>	<b>27,25</b>	<b>32,70</b>	<b>40,05</b>	<b>%</b>	<b>992.426.122,00</b>	<b>852.945.162,00</b>	<b>881.500.000,00</b>

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Keluaran:</b> Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5,00	5,00	5,00	Laporan	992.426.122,00	852.945.162,00	881.500.000,00
	<b>Hasil:</b> Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	100,00	120,00	147,00	Organisasi Masyarakat			
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2,00	2,00	2,00	Laporan	1.640.000,00	1.144.600,00	1.500.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	1,00	1,00	1,00	Laporan	1.250.000,00	2.545.200,00	6.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	5,00	5,00	5,00	Laporan	730.239.122,00	622.443.362,00	646.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	13,00	16,00	16,00	O/T	117.000.000,00	149.422.000,00	144.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	19,00	19,00	20,00	O/T	142.297.000,00	77.390.000,00	84.000.000,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Capaian:</b> Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100,00	100,00	100,00	%	510.947.700,00	987.377.832,00	1.367.500.000,00
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Keluaran:</b> Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5,00	5,00	8,00	Laporan	510.947.700,00	987.377.832,00	1.367.500.000,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
	<b>Hasil: Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>Rekomendasi</b>			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2,00	2,00	2,00	Laporan	1.600.000,00	1.144.600,00	1.500.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	3,00	3,00	3,00	Laporan	7.001.100,00	11.598.000,00	6.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	5,00	5,00	8,00	Laporan	276.243.600,00	725.010.232,00	1.015.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	10,00	10,00	15,00	O/T	90.000.000,00	90.000.000,00	135.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	34,00	39,00	50,00	O/T	136.103.000,00	159.625.000,00	210.000.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Capaian: Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur</b>	<b>33,66</b>	<b>33,33</b>	<b>33,00</b>	<b>%</b>	<b>1.192.934.650,00</b>	<b>3.727.605.690,00</b>	<b>4.126.786.800,00</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Keluaran: Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>1.192.934.650,00</b>	<b>3.727.605.690,00</b>	<b>4.126.786.800,00</b>



URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
	<b>Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							
	<b>Hasil: Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur</b>	<b>102,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Konflik</b>			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2,00	2,00	2,00	Laporan	1.781.800,00	3.128.800,00	1.500.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	3,00	3,00	3,00	Laporan	2.451.000,00	2.268.000,00	6.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	7,00	9,00	11,00	Laporan	503.635.850,00	581.535.090,00	1.035.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	34,00	41,00	31,00	O/T	306.000.000,00	303.795.000,00	279.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	5,00	108,00	100,00	O/T	379.066.000,00	451.592.000,00	420.000.000,00

URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				PENDANAAN		
		2021	2022	2023	SATUAN	2021	2022	2023
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Indikator: Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0,00	100,00	100,00	%	0,00	2.385.286.800,00	2.385.286.800,00
<b>Jumlah</b>						<b>19.695.186.938,00</b>	<b>24.834.973.600,00</b>	<b>27.334.973.600,00</b>

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

---

Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

<b>RENSTRA SKPD</b>										
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>						<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS RENSTRA</b>
		<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>							
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	66,27 %	67,00 %	67,50 %	68,00 %	68,50 %	Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Teewujudnya Masyarakat Kaltim yang berideologi Pancasila dan berkarakter bangsa	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, wasbang dan karakter bangsa	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5,00 % (7.617)	5,00 % (7.617)	6,00% (9.140)	7,00% (10.664)	8,00% (12.187)	Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi untuk	Membina dan membangun karakter bangsa secara berkelanjutan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

RENSTRA SKPD										
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RENSTRA
		INDIKATOR	TARGET							
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								menjaga keutuhan NKRI		
Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Kalimantan Timur	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan pembinaan, pengembangan dan penguatan ekonomi, sosial, budaya dan pemberdayaan organisasi masyarakat	Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

RENSTRA SKPD										
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RENSTRA
		INDIKATOR	TARGET							
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas se Kalimantan Timur	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	100 Ormas	120 Ormas	27,25 % (100 Ormas)	32,70 % (120 Ormas)	40,05 % (147 Ormas)	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur	Membina dan memberdayakan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	102 Konflik	102 Konflik	33,66 % (102 Konflik)	33,33 % (101 Konflik)	33,00 % (100 Konflik)	Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan instansi dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini daerah dan forum-forum	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

## **BAB VIII PENUTUP**

---

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2019-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama 3 (tiga) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra ini merupakan pedoman bagi semua kepala bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kepala Badan,

**Drs.Sufian Agus, M.Si.**

NIP. 19660204 198803 1 016